

**PENGARUH KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI  
UMUM TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Empiris Pada Kabupaten Se-Karesidenan Pati Tahun 2010-2016)**

*Arum Puspitasari<sup>1</sup>, Naila Rizki Salisa<sup>2</sup>*

*Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muria Kudus*

[<sup>1</sup>arumsa36@gmail.com](mailto:arumsa36@gmail.com)

[<sup>2</sup>naila.rizki@umk.ac.id](mailto:naila.rizki@umk.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji : (1) Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. (2) Pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Karesidenan Pati. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi berupa laporan realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Karesidenan Pati dari Tahun 2010-2016. Penetapan sampel ditetapkan dengan teknik *total sampling* yaitu sebanyak 5 Kabupaten dan Kota di Karesidenan Pati. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)) dan Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Teknik analisis data dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. (2) Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

**Kata Kunci** : Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum.

**ABSTRACT**

*This study is meant to analyze (1) The effect of local revenue performance to the local financial independence level. (2) The effect of general allocation funds to the local financial independence level on cities in Pati Residency. The research method used in this research is quantitative method. Budget realization report from each districts and cities in Pati Residency as population from the year 2010 to 2016. The sample set is determined by use total sampling technique, as 5 districts and cities in Pati Residency. The data utilizes is secondary data obtained from the official website of the Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah ([www.djbk.depkeu.go.id](http://www.djbk.depkeu.go.id)) and Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). The data analysis has been done by using multiple linier regressions analysis. The result of the research shows that : (1) The local revenue has a significant negative effect on the local financial independence level. (2) The general allocation fund has a significant negative effect on the local financial independence level.*

**Keyword** : Local Financial Independence Level, Local Revenue, and General Allocation Fund.

## I PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia secara resmi diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2001 yang ditandai dengan diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 ini telah direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan sekarang diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijakan sendiri, serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangannya sendiri.

Menurut Ernawati (2017) otonomi daerah ditandai dengan adanya penyerahan kewenangan daerah dan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh pemerintah pusat. Prinsip dasar pemberian otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa hanya daerah yang lebih mengetahui semua kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat didaerahnya masing-masing. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri tanpa harus bergantung pada dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Provinsi.

Salah satu tujuan pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia adalah untuk mencapai kemandirian keuangan daerah. Menurut Halim dkk (2012) kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri apabila PAD yang diperoleh Pemerintah Daerah lebih besar daripada bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Ernawati (2017) dalam bidang keuangan daerah, fenomena umum yang dihadapi oleh Pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat lebih mendominasi susunan APBD. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah agar bisa menjadi daerah yang mandiri dalam pengelolaan keuangan dan mengurangi ketergantungan pembiayaan yang berasal Pemerintah Pusat atau pihak eksternal.

Menurut Halim dkk (2012) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengenali sumber daya yang dimiliki untuk dapat meningkatkan PAD. Apabila struktur PAD sudah kuat, maka daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat untuk mengurangi adanya campur tangan dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi. PAD merupakan salah satu indikator atau kriteria dalam mengukur ketergantungan keuangan suatu daerah kepada Pemerintah Pusat. Semakin besar PAD yang diperoleh suatu daerah maka semakin kecil ketergantungan daerah tersebut terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Selain PAD kemandirian keuangan daerah juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti dana alokasi umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Namun terdapat kendala dalam implementasi otonomi daerah di wilayah Kabupaten Se-Eks Karesidenan Pati, yaitu adanya kesenjangan fiskal antar daerah. Untuk itu, pemerintah pusat memberikan bantuan (transfer) kepada pemerintah daerah, salah satunya dengan pemberian Dana Alokasi umum (DAU).

Berdasarkan laporan BPS Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2016 diketahui bahwa pemerintah daerah Kabupaten Se-Eks Karesidenan Pati belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat didalam mengatur rumah tangga daerah, atau dapat dikatakan bahwa kemandirian keuangan daerah di Wilayah Kabupaten Se-Eks Karesidenan Pati masih rendah yang ditunjukkan dengan lebih kecilnya jumlah PAD daripada jumlah belanja modal. Sehingga untuk menutupi kekurangan dana yang sudah dihabiskan dalam belanja modal pemerintah daerah kabupaten Se-Eks Karesidensan Pati membutuhkan dana Transfer dari pemerintah pusat yang berupa DAU. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah di wilayah kabupaten Se-Eks Karesidenan Pati masih rendah karena tingkat ketergantungan pemerintah daerah yang lebih besar terhadap DAU dibandingkan PAD dalam mendanai belanja modal dan belanja daerah.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Ernawati (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, pertama adalah menambah variabel dana alokasi umum yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Semakin besar dana alokasi umum didalam susunan APBD suatu daerah maka akan semakin rendah kemandirian keuangan daerah tersebut menurut Reza marizka (2013). Perbedaan kedua, pada objek penelitian sebelumnya yang dilakukan Ernawati (2017) berpusat pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sedangkan penelitian ini menggunakan objek penelitian yang berpusat pada Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Pati. Perbedaan ketiga adalah penelitian sebelumnya yang dilakukan Ernawati (2017) pada periode tahun 2012-2015 sedangkan penelitian ini menggunakan periode tahun 2010-2016.

Dengan adanya hasil penelitian yang berbeda-beda di berbagai wilayah inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang sejenis tentang pengaruh kinerja pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah dengan mengambil sampel dari wilayah Kabupaten/Kota di Karesidenan Pati Tahun 2010-2016.

### **Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kinerja pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Keagenan**

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak dimana satu atau lebih (prinsipal) melimpahkan wewenang kepada orang lain (agen) untuk kepentingan mereka. Permasalahan hubungan keagenan ini mengakibatkan terjadinya informasi asimetris dan konflik kepentingan menurut Jensen dkk (1976). Teori keagenan berusaha mendeskripsikan hubungan antara agen dan prinsipal dengan menggunakan mekanisme suatu kontrak. Teori keagenan menggunakan penekanan pada penyelesaian dua masalah yaitu : a) masalah keagenan yang muncul ketika keinginan/tujuan antara agen dan prinsipal bertentangan, dan sulit bagi prinsipal memverifikasi hasil kerja agen yang sesungguhnya, b) masalah pembagian resiko (*risk sharing*) yang terjadi ketika prinsipal dan agen mempunyai preferensi dan sikap yang berbeda terhadap suatu resiko.

## Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim dkk (2012) kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

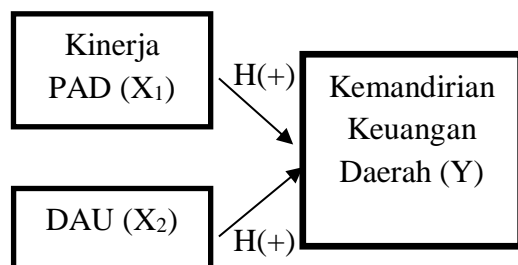
### Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

### Dana Alokasi Umum

Pasal 1 ayat 21 UU No.33 tahun 2004 menyatakan Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

### Kerangka Pemikiran



Sumber : Ernawati (2017) yang dimodifikasi untuk penelitian ini.

### Pengembangan Hipotesis

#### Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah. Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah adalah seperti hubungan antara principal dan agent. Masyarakat yang diwakili oleh DPRD adalah principal dan pemerintah adalah agent. Agent

diharapkan dalam mengambil kebijakan keuangan menguntungkan principal. Principal memiliki wewenang pengaturan kepada agent, dan memberikan sumberdaya kepada agent dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian yang mendukung tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dilakukan oleh Ernawati (2017), yang menjelaskan bahwa kinerja pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

**H1** : Kinerja Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah. Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah adalah seperti hubungan antara principal dan agent. Masyarakat yang diwakili oleh DPRD adalah principal dan pemerintah adalah agent. Agent diharapkan dalam mengambil kebijakan keuangan menguntungkan principal. Principal memiliki wewenang pengaturan kepada agent, dan memberikan sumberdaya kepada agent dalam bentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU).

Hasil penelitian yang mendukung tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dilakukan oleh Kurnia Rina dkk (2016) yang menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

**H2** : Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

## **III. METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 Kabupaten dan Kota di Karesidenan Pati. Penentuan sampel ditetapkan dengan teknik *total sampling*, yakni seluruh populasi dijadikan sampel. Jumlah daerah Kabupaten dan Kota di Karesidenan Pati adalah 5 Kabupaten dan Kota, berarti sampel yang digunakan juga sebanyak 5 Kabupaten dan Kota di Karesidenan Pati.

## IV. HASIL PENELITIAN

### Uji Statistik Deskriptif

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
PAD	35	0,058	0,153	0,110	0,026
DAU	35	0,037	0,361	0,158	0,065
KKD	35	0,437	0,742	0,541	0,056
Valid N (listwise)	35				

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Data dalam penelitian ini sebanyak 35 dengan menggunakan uji *one-sample kolmogorov-smirnov test*. Nilai *asyp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 yaitu 0,074, maka data berdistribusi normal dan dapat dilakukan analisis selanjutnya.

#### Uji Multikolinieritas

Peneliti ini melakukan uji multikolinieritas dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Hal ini terlihat dari nilai *tolerance* yang tidak ada kurang dari 0,1 dan nilai VIF yang lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam penelitian ini, maka asumsi multikolinieritas terpenuhi.

#### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Uji autokorelasi untuk penelitian ini menggunakan uji statistik *Durbin Watson Test*. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 1,541, nilai ini termasuk dalam kategori dasar pengambilan keputusan Uji Autokorelasi dimana angka *Durbin Watson* terletak diantara -2 sampai +2. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ada autokorelasi positif maupun negatif, sehingga asumsi autokorelasi terpenuhi.

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* residual satu ke pengamat lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas menurut Ghozali (2016). Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan *uji glejser*. Dengan asumsi apabila variabel bebas tidak berpengaruh terhadap nilai absolute residual ( $sig > 0,05$ ) maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa semua variabel bebas tidak berpengaruh terhadap absolute residual, dimana nilai *sig* dari variabel bebas lebih dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Dengan demikian asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

### **Analisis Regresi Linier Berganda**

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS 23, maka persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,704 - 1,048 X_1 - 0,302 X_2 + e$$

### **Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* diperoleh sebesar 0,026. Hal ini berarti bahwa sebesar 2,6% variasi besarnya kemandirian keuangan daerah bisa dijelaskan oleh variasi pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Adapun sisanya 97,4% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. *Standar error of the estimate* 0,026 menunjukkan besarnya kesalahan model dalam memprediksinya variabel bebas yang menunjukkan ketepatan dari variabel bebas dalam memprediksi variabel dependennya.

### **Uji Signifikansi Simultan (Uji Nilai F)**

Berdasarkan nilai signifikan sebagai  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kemandirian keuangan daerah.

### **Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Nilai t)**

Dalam penelitian ini dapat diketahui:

1. Berdasarkan perhitungan uji statistik t, diketahui pendapatan asli daerah memiliki koefisien -1,048 dan t hitung sebesar -3,448 dengan probabilitas (*sig*) 0,002. Nilai probabilitas (*sig*) ini kurang 0,05, sehingga dapat disimpulkan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dengan arah negatif. Dengan demikian hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima.
2. Berdasarkan perhitungan uji statistik t, diketahui dana alokasi umum memiliki koefisien -0,302 dan t hitung sebesar -2,523 dengan probabilitas (*sig*) 0,017. Nilai probabilitas (*sig*)



ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis tiga ( $H_2$ ) ditolak.

## V. Kesimpulan

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

## Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel yang ada di Kabupaten dan Kota di Karesidenan Pati, sehingga hasil penelitian ini belum mencerminkan kemandirian keuangan daerah sesungguhnya di Karesidenan yang lain di Provinsi Jawa Tengah
2. Rentang waktu penelitian hanya dilakukan selama 7 tahun yaitu dari 2010-2016, sehingga belum bisa digeneralisasi.
3. Penulis belum bisa menjelaskan dan memberikan bukti yang cukup jelas dan akurat terhadap penyebab hasil penelitian yang tidak sesuai dengan teori dan hipotesis penelitian.

## Saran

1. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan sampel penelitian tidak hanya satu Karesidenan tetapi bisa menjangkau semua kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
2. Memperpanjang periode pengamatan pengambilan sampel agar data lebih akurat.
3. Diharapkan bagi peneliti berikutnya agar dapat menambah variabel-variabel lain yang kemungkinan bisa menjadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah seperti pertumbuhan ekonomi. Dengan memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah daerah akan dapat memungut biaya retribusi sehingga mampu menambah pendapatan dan tidak bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ariani, Kurnia Rina dan Putri Gustita Arnawati, 2016. *Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*. Syariah Paper Accounting FEB UMS. ISSN 2460-0784. Hal: 364-369.
- Bastian dan Soepriyanto, 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Darwis Erstelita Tria Ramadhani, 2015. *Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Proinsi Sumatra Barat (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatra Barat)*. Hal: 1-23
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013a. *Manajemen Belanja Daerah*. Diakses pada 20 Oktober 2015 dari <http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id>
- Eisenhardt, Kathleem. 1989. *Agency Theory: An Assesment and Review*. *Academy of Management Review*, 14. Hal 57-74.
- Ernawati, 2017. *Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. VI. No. 2/Hal: 531-545.
- Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Edisi Delapan. Penerbit BPUD: Semarang.
- Halim, A. Dan M. S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat, Salemba Empat. Jakarta.
- Ikasari Putri, 2015. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta.
- Imawan, R. Dan A. Wahyudin. 2014. *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah*. *Accounting Analysis Journal* 3(2):147-155.
- James H. Davis, F. David Scoorman dan Lex Donalson. 1997. "Toward a Stewardship Theory of management". *Academy of Management Review* Vol. 22, No.1, page 22-47, 1997.

- Jensen, Micahel C., William H. Meckling, 1976, Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, The Journal of Financial Economics.
- Lestari Anita, 2016. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara*. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan. Vol. 1, No 2, 2016.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Yogyakarta.
- Marizka Reza, 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Sumatra Barat (Tahun 2006-20011)*. Skripsi. Padang: Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Raharjo, E. 2007. *Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi*. Fokus Ekonomi 2(1) : 37-46.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Siagian, S. N. 2014. *Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Simatupang, F. F. 2016. *Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.